

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025
(R E N J A)

KECAMATAN DUA PITUE



**PEMERINTAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya, kita telah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Dua Pitue Tahun 2025. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Dua Pitue Tahun 2025 ini merupakan bentuk perencanaan Kecamatan Dua Pitue dalam 1 tahun kedepan, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2024-2026.

Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini mungkin ditemui data, informasi dan cara penyajian yang belum optimal, untuk itu atas kekurangan dan kelemahan Renja Kecamatan Dua Pitue masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tanrutedong, 01 Agustus 2024


ANDI SAMMANG, SH. MH
Pembina Tk. I
NIP :19711030 200212 1 005

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	22
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah	25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	43
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Program Kegiatan	44
BAB V. PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya disebut Renja Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Dua Pitue tahun ke-dua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang, yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Kabupaten Sidenreng Rappang, dokumen ini juga merupakan instrumen dalam mewujudkan muatan-muatan yang terkandung pada RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023, bahwasanya visi dan misi yang terkandung dalam dokumen Renja ini berpedoman pada visi-misi RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025. Visi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu **“Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025”**. Visi tersebut menempatkan Kabupaten terkemuka sebagai kata kunci yang dapat ditransformasikan ke dalam 3 (Tiga) perspektif keunggulan, yaitu :

1. **Sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis**, yang mengandung makna bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimilikinya, menginginkan untuk tumbuh dan berkembang menjadi pusat pengembangan agribisnis di Sulawesi Selatan. Pusat pengembangan agribisnis dimaksud mencakup 4 (empat) kegiatan utama yaitu usaha tani, pengolahan, pemasaran dan jasa-jasa. Dengan dukungan posisi geografis yang sangat strategis dukungan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai, tingkat aksesibilitas yang relatif cukup baik dan akar budaya kuat memungkinkan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mampu memposisikan diri sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. **Sebagai Wilayah yang Mandiri**, yang dapat dimaknakan sebagai kemampuan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Kemandirian dicapai melalui pengembangan interkoneksi inter dan antar wilayah. Dengan adanya interkoneksi maka berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan wilayah seperti sumber daya manusia, kelembagaan, infrastruktur, pembiayaan pembangunan dan ketahanan pangan akan dapat berkembang lebih cepat ke arah yang lebih baik.

3. **Masyarakat Berbudaya dan Religius**, yang lebih dimaknakan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak bersifat sekuler, akan tetapi selalu berlandaskan dan bernafaskan nilai-nilai budaya dan ajaran agama. Konsepsi pembangunan seperti itu diyakini akan mampu membentuk masyarakat yang religius, etis dan bermoral.

Misi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2025, mencakup 6 (enam) hal, yaitu :

1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
2. Mengembangkan sistem agribisnis;
3. Membangun kemandirian masyarakat;
4. Membangun Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Governance);
5. Membangun kehidupan Sosial Budaya;
6. Mengaktualisasikan nilai nilai agama.

Kecamatan Dua Pitue sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, memfokuskan pembangunan sesuai misi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu **“Membangun Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Governance)”**.

Selain mempedomani dokumen yang disebutkan diawal, perlu juga mempertimbangkan terhadap kebijakan yang masih berlaku seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta aturan-aturan lainnya yang masih berlaku.

Pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam

jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Perencanaan pembangunan, dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Pembangunan merupakan proses yang berjalan secara stimulan yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan arah dan tindakan yang diharapkan di masa depan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Pelaksanaan merupakan aktualisasi dari perencanaan yang telah ditetapkan, sedangkan pengendalian merupakan proses pengarahan kegiatan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sedangkan evaluasi merupakan aktifitas menilai hasil yang terjadi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan bersama. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Dua Pitue mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Tellu Limpoe dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan

setiap tahun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Dua Pitue yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 serta menjadi acuan di dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Dua Pitue. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Renja Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Dua Pitue. Sejalan dengan itu, muatan Renja Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (rencana kerja anggaran) Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk menjabarkan Renstra Kecamatan Dua Pitue tahun 2024-2026 yang merupakan perencanaan satu periode ke dalam perencanaan yang sifatnya tahunan (1 tahun).

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- Menyiapkan Acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Dua Pitue ;
- Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Renja Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

- BAB II.** HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU terdiri atas beberapa bagian yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III.** TUJUAN DAN SASARAN terdiri atas beberapa bagian yaitu Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Dua Pitue
- BAB IV.** RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH terdiri atas beberapa bagian yaitu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dan Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- BAB V.** PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya, maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2024 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah mencapai tingkat realisasi target Renja 97 % dari target sebesar 100% dan Capaian target Renstra (periode 2024-2026) sampai tahun 2024 diperkirakan telah mencapai 90%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang mencakup kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat terdiri dari dua sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan dan sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan telah mencapai realisasi target Renja 100% dari target 100% dan capaian target Renstra (periode 2024-2026) sampai tahun 2024 telah mencapai 100%.
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang mencakup kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah terdiri dari satu sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan belum mencapai target realisasi hingga di tahun 2024 dari target renja 100% dikarenakan sub kegiatan baru tersedia di Renstra periode 2024-

2025 dan capaian target Renstra (periode 2024-2026) sampai tahun 2024 telah mencapai 90%.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang mencakup Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari satu sub kegiatan yaitu sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan dan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan terdiri dari empat sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan sub kegiatan Evaluasi Kelurahan telah mencapai tingkat realisasi target Renja 100% dari target Renja tahun 2023 yaitu 90 % dan Capaian target Renstra (periode 2024-2026) sampai tahun 2024 telah mencapai 70%.

Realisasi capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan disebabkan meningkatnya antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, hal ini menunjukkan bahwa pilihan jenis kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat kelurahan dan pelaksana kegiatan memiliki kemampuan untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mencakup kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum telah mencapai tingkat realisasi target Renja 0 % dari target sebesar 100% dan Capaian target Renstra (periode 2024-2026) sampai tahun 2024 diperkirakan telah mencapai 70%.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

1. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;

2. Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur, kelurahan tentang kebijakan pemerintah kabupaten;
3. Terlambatnya proses pencairan anggaran program kegiatan yang terkait;
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;

Bertitik tolak dari pengertian isu di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Dua Pitue, maka isu strategis yang berkembang terhadap Kecamatan Dua Pitue berhasil di observasi dan dihimpun fenomenanya sebagai kebijakan/tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut sebagai berikut;

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pelayanan prima, kantor kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan

masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

3. Peningkatan kualitas aparatur dan sarana prasarana penunjang. Keberadaan aparatur dan sarana prasarana penunjang merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur dan sarana prasarana penunjang yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana penunjang.
4. Peningkatan akses ketetapan waktu dan transparansi pengelolaan keuangan daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2024 untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel TC 29.

TABEL TC 29. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA KANTOR
KECAMATAN DUA PITUE TAHUN 2024 S/D 2026

RENSTRA 2018 - 2023

OPD : KECAMATAN DUA PITUE

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022 (2021+2022)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2024) TARGET APBD	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2024	
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5 + 7 + 9)	11
7					Unsur Kewilayahan									
7	01				Kecamatan									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	11	11	11	100			
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	11	11	11	100			
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	10 Urs	10	10	10	1,0			
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1 Urs	1	1	1	1,0			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam	100 %			89				

					KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan		37	114		138			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	-	5	5	100			
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	5 Keg	-	5	5	1			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	74	219	169	75			
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	200 Org	50	200	150	1			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	8 unit	24	8	8	1			
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	10 Kegiatan	-	10	10	1			
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	2 Kel	-	2	2	1			
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	19	19	19	100			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	19	19	19	100			
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	8 Desa	8	8	8	1			
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	8 Desa	8	8	8	1			

7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	8	Desa	8	8	8	1			
X					X										
X	XX				XX										
X	XX	01			XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	0	100	%	1.648	848	848	517			
X	XX	01	1.01		XXX Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Perencanaan Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	2	1	1	100			
X	XX	01	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Kooordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Bln	2	1	1	1			
X	XX	01	2.02		XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	28	20	20	100			
X	XX	01	2.02	01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bln	28	14	14	1			
X	XX	01	2.02	03	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bln	-	12	12	1			
X	XX	01	2.06		XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	182	107	107	100			
X	XX	01	2.06	01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14	Bln	14	4	4	1			
X	XX	01	2.06	02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	28	Unit	56	28	28	1			
X	XX	01	2.06	03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	40	Unit	40	40	40	1			

X	XX	01	2.06	09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	140	Kali	286	140	140	1			
X	XX	01	2.07		XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	4	2	2	100			
X	XX	01	2.07	05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	-	Unit	2	-	-	-			
X	XX	01	2.07	10	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang diadakan	4	Unit	4	4	4	1			
X	XX	01	2.08		XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.432	716	716	100			
X	XX	01	2.08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	700	lbr	1.400	700	700	1			
X	XX	01	2.08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bln	24	12	12	1			
X	XX	01	2.08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12	Bln	24	12	12	1			
X	XX	01	2.09		XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	6	11	11	100			
X	XX	01	2.09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	10	Unit	3	10	10	1			
X	XX	01	2.09	06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	0	Unit	-	-	-	-			
X	XX	01	2.09	09	XXX Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	4	Unit	8	4	4	1			

OPD : KECAMATAN DUA PITUE

Page 15

7	.1	.3	0		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%					80	27	26,75
7	.1	.3	201	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%					2	1	1
7	.1	.3	201	.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan					2	2	100
7	.1	.3	.202	0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	%					157	52	52
7	.1	.3	.202	.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100	Lembaga Kemasyarakatan					50	50	50,00
7	.1	.3	.202	.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	Unit					6	6	200,00
7	.1	.3	.202	.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100	Pokmas/Ormas					100	100	100,00
7	.1	.3	.202	.4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2	Laporan					2	2	100,00
7	.1	.5			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%					11	6	5,50
7	.1	.5	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%					11	6	6
7	.1	.5	201	.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi	12	Dokumen					11	11	91,67

X	XX	.1	.202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%					392	131	131
X	XX	.1	.202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1890	Org/Bln					392	392	20,74
X	XX	.1	.206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%					200	67	67
X	XX	.1	.206	.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	12	Paket					7	7	58,33
X	XX	.1	.206	.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18	unit					7	7	38,89
X	XX	.1	.206	.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	3	unit					2	2	66,67
X	XX	.1	.206	.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100	Paket					50	50	50,00
X	XX	.1	.206	.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan kantor yang disediakan	100	Paket					70	70	70,00
X	XX	.1	.206	.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12	Bulan					50	50	416,67
X	XX	.1	.206	.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	Kali					100	100	100,00
X	XX	1	.207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%					2	1	1
X	XX	1	.207	.5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang		Paket							

						diadakan	3					1,00	1	33,33
X	XX	1	.207	.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3	Paket				1,00	1	33,33
X	XX	.1	.208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%				81	27	27
X	XX	.1	.208	.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	100	Laporan				70	70	70,00
X	XX	.1	.208	.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	12	Laporan				8	8	66,67
X	XX	.1	.208	.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan				8	8	66,67
X	XX	.1	.209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan	100	%				11	4	4
X	XX	.1	.209	.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10	Unit				5	5	50,00
X	XX	.1	.209	.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	11	Unit				5	5	45,45
X	XX	.1	.209	.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	4	Unit				2	2	50,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada pada Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan / sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Dalam mencapai Kinerja Pelayanan Kecamatan Dua Pitue Tahun 2025 berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Dua Pitue merupakan bagian Integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Dua Pitue berikut ini : *(Tabel T-C.30.)*

TABEL TC 30. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR KECAMATA DUA PITUE

OPD : KECAMATAN DUA PITUE

No	Indikator Permendagri 86 ,18, dan SPM	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Ket.
1	Tingkat Partisipasi Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Tingkat Partisipasi Kepemudaan	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Tingkat Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Tingkat Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	%	0	21	31	41	51	57	60	62	68	73	75	80	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	0	0	0	70	72	77,59	81,09	82,45	84,01	85.79	87.92	89	
7	Predikat Nilai SAKIP	Kategori	0	0	0	0	0	(C) 37,82	(C) 45,54	(CC) 50,75	(CC) 54,81	CC (58,80)	B (63,20)	B (68,40)	
8	Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dijalankan Dengan Baik	%	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan Di Kecamatan	%	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Jumlah Desa Yang Dibina Dan Diawasi	%	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	
11	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	IKK
12	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	%	0	0	0	0	0	0	72	73	74	78	83	85	IKK
13	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	IKK
14	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan isu-isu strategis dalam memproyeksi kondisi yang diharapkan kedepan dalam kaitannya dengan bidang tugas Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan mengimplementasikan metode analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities dan Threats) isu tersebut akan memiliki arti fungsional apabila dibahas dalam kaitannya dengan kondisi realitas organisasi.

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Dua Pitue bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

a) Penanganan Stunting di tingkat Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan, maka kantor Kecamatan Dua Pitue sebagai salah satu Perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan pendataan akurat setiap masyarakat desa dan Kelurahan serta mengupayakan penanganan optimal untuk menurunkan angka stunting di lingkup Kecamatan.

b) Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Sehubungan dengan Inpres nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, maka Kecamatan Dua Pitue berkoordinasi dengan tim Data P3KE untuk memastikan program lintas sektor dan lintas lapis pemerintahan dapat menjangkau wilayah/kantung kemiskinan dan kelompok miskin ekstrem serta penyempurnaan basis data penetapan akurasi sasaran.

c) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;

- d) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e) Pelayanan prima, kantor kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- f) Peningkatan kualitas aparatur dan sarana prasarana penunjang. Keberadaan aparatur dan sarana prasarana penunjang merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur dan sarana prasarana penunjang yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana penunjang.

Lingkup analisis Kinerja pelayanan di Kecamatan Dua Pitue meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

A. Lingkungan Internal

➤ Peluang:

1. Visi dan Misi Organisasi yang jelas
2. Kekuatan Hukum tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan
3. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
4. Kewenangan koordinasi ditingkat Kecamatan
5. Adanya sarana dan prasarana

➤ Tantangan:

1. Kualitas SDM yang belum memadai
2. Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan Kecamatan yang diakibatkan belum jelasnya target sasaran yang merupakan ukuran pencapaian yang ingin dicapai
3. Belum optimalnya data-data kondisi ekonomi sosial dan budaya yang menjadi bahan analisis dalam perumusan perencanaan ditingkat Kecamatan

B. Lingkungan Eksternal

➤ Peluang:

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
2. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
3. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan Kecamatan
4. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
5. Diklat peningkatan kualitas aparatur

6. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
7. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram.

➤ **Tantangan:**

1. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
2. Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
3. Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat
4. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
5. Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan Dokumen Perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas pembangunan daerah dan
3. Rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja, pendanaan, dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Dua Pitue berdasarkan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah se-Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Dua Pitue.

Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel T-C.31.

TABEL TC 31. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

OPD : KECAMATAN DUA PITUE

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UNSUR KEWILAYAHAN											
KECAMATAN					3.054.303.806					2.843.920.130	
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Dua Pitue	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	1.010.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Dua Pitue	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	900.000	
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Dua Pitue	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1.010.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Dua Pitue	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	900.000	
1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec. Dua Pitue	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	10 Laporan	505.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec. Dua Pitue	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	10 Laporan	450.000	
1.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Dua Pitue	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	505.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Dua Pitue	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	450.000	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Dua Pitue	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	50.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Dua Pitue	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	50.000.000	

2,1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Dua Pitue	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	50.500.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Dua Pitue	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	50.000.000	
2.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Dua Pitue	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	50.500.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Dua Pitue	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	50.000.000	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Dua Pitue	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	394.663.560	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Dua Pitue	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74%	238.244.800	
3.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Dua Pitue	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	505.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Dua Pitue	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	74%	450.000	
3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Dua Pitue	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	505.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Dua Pitue	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	450.000	
3,2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Dua Pitue	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74%	394.158.560	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Dua Pitue	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74%	237.794.800	
3.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Dua Pitue	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga kemasyarakatan	1.515.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Dua Pitue	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			

3.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Salomallori, Kel. Tanrutedong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	186.563.160	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Salomallori, Kel. Tanrutedong	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	237.344.800	
3.2.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Salomallori, Kel. Tanrutedong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 Pokmas / Ormas	205.070.400	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Salomallori, Kel. Tanrutedong	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
3.2.4	Evaluasi Kelurahan	Kec. Dua Pitue	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	1.010.000	Evaluasi Kelurahan	Kec. Dua Pitue	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	450.000	
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Dua Pitue	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	5.050.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Dua Pitue	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	1.350.000	
4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Dua Pitue	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	5.050.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Dua Pitue	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	1.350.000	
4.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Dua Pitue	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	2.020.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Dua Pitue	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	450.000	
4.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Dua Pitue	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 Dokumen	2.020.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Dua Pitue	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 Dokumen	450.000	

4.1.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Dua Pitue	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	1.010.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Dua Pitue	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Dokumen	450.000	
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Dua Pitue	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.603.080.246	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Dua Pitue	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.553.425.330	
5,1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dua Pitue	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	505.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dua Pitue	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	494.500	
5.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Dua Pitue	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	505.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Dua Pitue	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	494.500	
5,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Dua Pitue	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.049.591.620	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Dua Pitue	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.067.848.130	
5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Dua Pitue	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	434 Org/Bln	2.049.591.620	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Dua Pitue	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	420 Org/Bln	2.067.848.130	
5,3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Dua Pitue	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	271.073.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Dua Pitue	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	172.832.700	

5.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Dua Pitue	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	Paket	1.515.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Dua Pitue	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	Paket	421.000	
5.3.2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kec. Dua Pitue	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	17	Paket	90.172.800	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kec. Dua Pitue	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8	Paket	72.348.200	
5.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Dua Pitue	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3	Paket	11.110.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Dua Pitue	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan				
5.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Dua Pitue	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100	Paket	46.460.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Dua Pitue	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				
5.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Dua Pitue	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	1.000	Paket	3.646.100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Dua Pitue	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	1.000	Paket	5.660.000	
5.3.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Dua Pitue	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12	Bulan	27.270.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Dua Pitue	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12	Bulan	20.000.000	
5.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Dua Pitue	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	Laporan	90.900.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Dua Pitue	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	Laporan	74.403.500	
5.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Dua Pitue	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%		62.589.236	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Dua Pitue	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah				
5.4.1	Pengadaan Mebel	Kec. Dua Pitue	Jumlah paket mebel yang diadakan	3	Unit	37.339.236	Pengadaan Mebel	Kec. Dua Pitue	Jumlah paket mebel yang diadakan				

5.4.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Dua Pitue	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainny yang disediakan	3	Unit	25.250.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Dua Pitue	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainny yang disediakan			
5,5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dua Pitue	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		162.614.040	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dua Pitue	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	270.092.000	
5.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Dua Pitue	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	100	Laporan	4.545.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Dua Pitue	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	264	Laporan	4.744.000
5.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Dua Pitue	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	12	Laporan	52.019.040	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Dua Pitue	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	12	Laporan	59.232.000
5.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Dua Pitue	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	106.050.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Dua Pitue	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	206.116.000
5,6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dua Pitue	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan	100%		56.706.450	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dua Pitue	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan	100%	42.158.000	
5.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Dua Pitue	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipeliharahan dan dibayarkan pajaknya	10	Unit	24.335.950	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Dua Pitue	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipeliharahan dan dibayarkan pajaknya	10	Unit	34.492.000
5.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Dua Pitue	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	11	unit	5.100.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kec. Dua Pitue	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	11	unit	4.054.000

			yang disediakan			Lainnya		yang disediakan			
5.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Dua Pitue	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	4 unit	27.270.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Dua Pitue	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	4 unit	3.612.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan Kantor Kecamatan Dua Pitue pada tahun perencanaan 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi wewenang Kecamatan dan Peningkatan kualitas aparaturnya.
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi ;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah. Telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Dua Pitue, maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat dapat dilihat pada table TC 32.

TABEL TC 32. USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

OPD : KECAMATAN DUA PITUE

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
N I H I L					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan daerah pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPD). Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Daerah yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang di bidang pemerintahan umum berdasarkan karakteristik kewilayahan. Tugas dan fungsi kecamatan adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Oleh karena itu, kecamatan lebih banyak berperan dalam hal peningkatan koordinasi dan fasilitasi terhadap kebijakan-kebijakan nasional dengan melaksanakan komunikasi intensif dengan instansi-instansi terkait dalam bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Berdasarkan Rancangan Undang-undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, maka tema pembangunan untuk periode pertama RPJMN Tahun 2025-2029 adalah ***“Penguatan Fondasi Transformasi”***.



RKP Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan pertama pada tahap pertama 2025-2029. Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2025 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2023, hasil Forum Konsultasi Publik RKP Tahun 2025, serta memperhatikan berbagai aspek imperative dari Rancangan Undang-undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2025 adalah ***“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***.

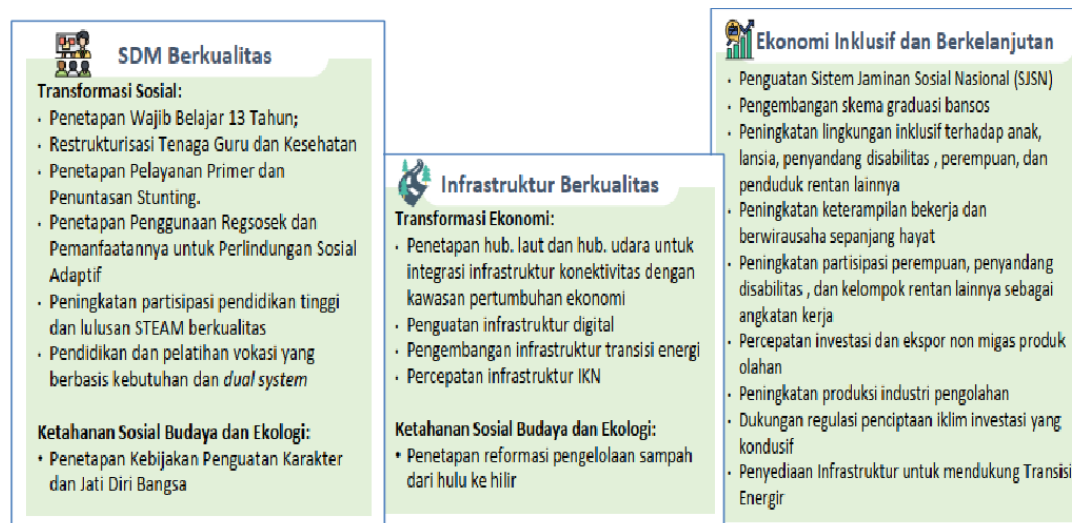
Sasaran pembangunan nasional Tahun 2025 yang termuat dalam Rancangan Awal RKP Tahun 2025, sebagai berikut:

No.	Sasaran Pembangunan Nasional	Realisasi 2023	Target Tahun 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.05	5.30-5.60
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5.32	4.50-5.00
3	Tingkat Kemiskinan (%)	9.36	7.0-8.0
4	Rasio Gini (Nilai)	0.388	0.379-0.382
5	Indeks Modal Manusia (nilai)	0.53	0.56
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	34.09	38.6
7	Nilai Tukar Petani (kumulatif)		113-115
8	Nilai Tukar Nelayan (kumulatif)		104-105

Sumber: Rancangan Awal RKP 2025.

Sesuai dengan tema RKP Tahun 2025, maka penekanan tema RKP Tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut: (1) SDM Berkualitas; (2) Infrastruktur Berkualitas; dan (3) Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang dijelaskan berdasarkan gambar dibawah ini:

Penekanan Tema RKP Tahun 2025



Sumber Data: Rancangan Awal RKP 2025

3.1.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang teralhir dijabarkan dari RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Adapun tema pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 yaitu “Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

PD1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;

PD2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata;

PD3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah;

PD4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata;

PD5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Penyusunan arah kebijakan pembangunan tahun 2025 disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPD. Arah kebijakan Pembangunan 2025 mengacu pada arah kebijakan RPD 2024- 2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi dan kinerja ASN berdasarkan kebutuhan organisasi;
2. Peningkatan kualitas penatausahaan kinerja keuangan;
3. Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel;
4. Peningkatan kualitas data, informasi dan keterbukaan informasi berbasis teknologi informasi yang didukung oleh keamanan informasi digital serta pengembangan inovasi;
5. Peningkatan keterjangkauan terhadap layanan infrastruktur yang berkualitas memenuhi standar GESI (Gender Equality and Social Inclusion);
6. Peningkatan kualitas produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan dan kelautan;
7. Mendorong peningkatan persebaran investasi ke daerah yang belum berkembang; peningkatan pelayanan dan pemberian kemudahan/insentif penanaman modal di daerah;
8. Peningkatan kualitas dan partisipasi Angkatan kerja di berbagai bidang pembangunan termasuk bagi penyandang disabilitas;
9. Peningkatan kualitas SDM masyarakat miskin, penguatan pemberdayaan masyarakat, pemberian kemudahan akses usaha dan pasar berbasis potensi local serta peningkatan kualitas layanan dasar kepada masyarakat miskin;
10. Mendorong Kerjasama dengan dunia usaha dan Lembaga keterampilan untuk kemandirian PPKS dan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin melalui dukungan berbagai sektor;
11. Peningkatan kualitas pembelajaran berbasis IT dengan pendekatan yang adaptif dan merata serta memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas;
12. Penguatan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang perbaikan kualitas pendidikan;
13. Peningkatan pemerataan dan kualitas akses pelayanan kesehatan dengan (1) pemenuhan sarana dan prasarana; (2) Pemenuhan jumlah dan distribusi SDM kesehatan secara bertahap dan menyeluruh termasuk SDM kesehatan mental dan disabilitas; (3) Penyusunan kebijakan dan perbaikan baseline data;
14. Perkuatan jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting;
15. Peningkatan kualitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;

16. Peningkatan kualitas Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di tingkat provinsi;
17. Peningkatan keberdayaan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik dan lapangan kerja formal termasuk bagi kelompok rentan;
18. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan pemenuhan hak dan perlindungan anak di seluruh sektor pembangunan;
19. Pemantapan pengelolaan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan secara berkelanjutan dan berkeadilan;
20. Peningkatan kualitas air, udara dan air laut serta upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
21. Pemantapan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, termasuk kelompok rentan, serta implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

3.1.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025

RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 menjabarkan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 yang masih berdasarkan RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025. Penyusunan perencanaan Tahun 2025 merupakan peralihan tahun perencanaan jangka panjang dari RPJPD Tahun 2005-2025 ke RPJPD Tahun 2025-2045, sehingga dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan kebijakan-kebijakan yang termuat dalam rancangan akhir RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045.

Adapun visi Kabupaten Sidenreng Rappang yang tertuang dalam rancangan akhir RPJPD

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045 adalah ***“Sidenreng Rappang Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Maju dan Berkelanjutan”***. dengan sasaran visi sebagai berikut:

Tabel.

Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2045

Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2023	Target 2045
Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	72,24	185,53
	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)		
	Kontribusi PDRB	27,28	35,10
	Industri Pengolahan (%)		
Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	4,79	2,50
	Rasio Gini (Indeks)	0,319	0,252
	Kontribusi PDRB Kab. Sidrap Terhadap Prov. Sulawesi Selatan (%)	24,57	25,15
Daya Saing Daerah Meningkat	Indeks Daya Saing Daerah	3,08	4
Daya Saing Sumberdaya Manusia Meningkat	Indeks Modal Manusia		
Intensitas Emis GRK Menurun Menuju Net Zero Emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)		

Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045.

Untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang, maka ditetapkan sejumlah misi pembangunan jangka panjang sebagai berikut:

M1.	Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang kuat;
M2.	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera;
M3.	Mewujudkan sumberdaya yang berkualitas;
M4.	Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan;
M5.	Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
M6.	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif;
M7.	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah;
M8.	Menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup.

Sumber data: Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045.

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya. serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi, sehingga prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis serta disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Tema Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 adalah **“Peningkatan Daya Saing Daerah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia”**. Dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

PD1	Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat;
PD2	Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengembangan Perekonomian Daerah;
PD3	Penguatan Infrastruktur dasar dan ekonomi;
PD4	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan;
PD5	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
PD6	Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana;
PD7	Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman.

Berdasarkan prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 difokuskan pada sasaran pembangunan sebagaimana pada sajian tabel berikut di bawah ini:

Tabel 4.5

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan/Sasaran Pembangunan	Indikator Tujuan/ Sasaran Pembangunan	Satuan	Capaian 2023	Target Tahun 2025
1	PD2. Penguatan Sistem Agrobisnis dalam mendukung Pengembangan Perekonomian Daerah	Meningkatkan pembangunan ekonomi	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	55.51	59.94
		Meningkatnya akses dan kesempatan kerja	Tingkat pengangguran Terbuka	Persen	3.29	3.10
2	PD3. Penguatan Infrastruktur dasar dan ekonomi	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	Laju pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.28	4.72-5.12
3	PD1. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Persen	5.14	4.91
		Berkurangnya ketimpangan pendapatan	Gini Ratio	Poin	0.345	0.330
4	PD4. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74.38*)	75.65
			Indeks Pembangunan	Indeks	92.53	92.89

			Gender (IPG)			
5	PD7. Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman	Membaiknya kehidupan sosial kemasyarakatan	Tingkat kriminalitas yang Tertangani	Persen	87.40	78.20
6	PD6. Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	65.79	66.55
		Meningkatnya Mitigasi Kebencanaan	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	119.20	115.15
7	PD5. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	48.74	61.15
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip	Poin	64.25	68.82
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	IKM	Persen	77.41	81.84
		Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	66.56	70.35

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Dua Pitue

Tujuan Rencana Kerja adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Untuk mencapai misi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 yang akan diwujudkan oleh Kantor Camat Dua Pitue sebagai salah satu Perangkat Daerah pelaksana pencapaian misi tersebut maka Kantor Camat Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan tujuan tahun yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas, maka ditetapkan beberapa sasaran strategis yang akan ditempuh yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum
2. Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi
3. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program Kegiatan

Penyusunan program dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kantor Kecamatan Dua Pitue dimana pada tahun 2025 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu Predikat Nilai SAKIP dengan nilai 63,20 (B), persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, persentase pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, dan persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi dengan baik dengan nilai 100%.

Program kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Dua Pitue tahun 2025 setelah dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perizinan
 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan
- b. Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum
 - Kordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan
 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan
 2. Pembangunan Sarana Dan Prasaranan Kelurahan
 3. Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
 4. Evaluasi Kelurahan
- c. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitas, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 1. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa

2. Fasilitas Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 3. Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman Da Ketertiban Umum
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
- Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Koordinasi Dan Peyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 5. Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan
 6. Fasilitas Kunjungan Tamu
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Mabel
 2. Pengadaan Sarana Dna Prasaranan Gedung Kantor Atau Bagunan Lainnya
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
 3. Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan Kantor Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 untuk jelasnya dapat dilihat pada *Tabel TC 33*.

Tabel TC 33. RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
OPD : KECAMATAN DUA PITUE

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7					Unsur Kewilayahan								
7	1				Kecamatan								
7	.1	.2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Dua Pitue	100%	900.000	DAU		100%	1.020.100
7	.1	.2	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Dua Pitue	100%	900.000	DAU		100%	1.020.100
7	.1	.2	204	.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Dua Pitue	10 Laporan	450.000	DAU		8 Laporan	510.050
7	.1	.2	204	.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Dua Pitue	1 Laporan	450.000	DAU		8 Laporan	510.050

7	.1	.5			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Dua Pitue	100%	50.000.000	DAU		100%	51.005.000
7	.1	.5	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Dua Pitue	100%	50.000.000	DAU		100%	51.005.000
7	.1	.5	201	.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Dua Pitue	12 Dokumen	50.000.000	DAU		11 Dokumen	51.005.000
7	.1	.3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Dua Pitue	100%	238.244.800	DAU		100%	324.152.696
7	.1	.3	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Dua Pitue	100%	450.000	DAU		100%	510.050
7	.1	.3	201	.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Dua Pitue	2 Laporan	450.000	DAU		2 Laporan	510.050
7	.1	.3	.202		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Dua Pitue	100%	237.794.800	DAU		100%	323.642.646
7	.1	.3	.202	.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. . Salomallori , Kel tanrutedon g	2 Lembaga kemasyarakatan	-	DAU		2 Lembaga kemasyarakatan	1.530.150

7	.1	.3	.202	.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. . Salomallori , Kel tanrutedong	6	Unit	237.344.800	DAU		6	Unit	188.428.792
7	.1	.3	.202	.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. . Salomallori , Kel tanrutedong	100	Pokmas/Ormas	-	DAU		100	Pokmas/Ormas	132.663.604
7	.1	.3	.202	.4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kec. Dua Pitue	2	Laporan	450.000	DAU		2	Laporan	1.020.100
7	.1	.6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Dua Pitue	100%		1.350.000	DAU		100%		5.100.500
7	.1	.6	.201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Dua Pitue	100%		1.350.000	DAU		100%		5.100.500
7	.1	.6	.201	.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Dua Pitue	8	Dokumen	450.000	DAU		8	Dokumen	2.040.200
7	.1	.6	.201	.7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Dua Pitue	8	Dokumen	450.000	DAU		8	Dokumen	2.040.200
7	.1	.6	.201	.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Dua Pitue	8	Dokumen	450.000	DAU		8	Dokumen	1.020.100

X					X									
X	XX				XX									
X	XX	.1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dua Pitue	100%	2.553.425.330	DAU		100%	2.629.110.947	
X	XX	.1	.201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dua Pitue	100%	494.500			100	510.050	
X	.X X	.1	.201	.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Dua Pitue	1 Laporan	494.500	DAU		1 Laporan	510.050	
X	XX	.1	.202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Dua Pitue	100%	2.067.848.130	DAU		100%	2.070.087.536	
X	XX	.1	.202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kec. Dua Pitue	420 Org/Bln	2.067.848.130	DAU		434 Org/Bln	2.070.087.536	
X	XX	.1	.206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Dua Pitue	100%	172.832.700	DAU		100%	273.784.539	
X	XX	.1	.206	.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kec. Dua Pitue	12 Paket	421.000	DAU		12 Paket	1.530.150	
X	XX	.1	.206	2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Dua Pitue	8 Paket	72.348.200	DAU		45 Paket	91.074.528	

X	XX	.1	.206	.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kec. Dua Pitue	13	Paket	-	DAU		8	Paket	11.221.000
X	XX	.1	.206	.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kec. Dua Pitue	-	Paket	-	DAU		300	Paket	46.924.600
X	XX	.1	.206	.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	Kec. Dua Pitue	1.000	Paket	5.660.000	DAU		300	Paket	3.682.561
X	XX	.1	.206	.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Kec. Dua Pitue	12	Bulan	20.000.000	DAU		100	Bulan	27.542.700
X	XX	.1	.206	.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Dua Pitue	100	Laporan	74.403.500	DAU		300	Laporan	91.809.000
X	XX	1	.207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kec. Dua Pitue	100%		-	DAU		100%		63.215.128
X	XX	1	.207	.5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	Kec. Dua Pitue	-	Unit	-	DAU		6	Paket	37.712.628
X	XX	1	.207	.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kec. Dua Pitue	-	Unit	-	DAU		1	Unit	25.502.500
X	XX	.1	.208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Dua Pitue	100%		270.092.000	DAU		100%		164.240.180
X	XX	.1	.208	.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Kec. Dua Pitue	264	Laporan	4.744.000	DAU		300	Laporan	4.590.450
X	XX	.1	.208	.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	Kec. Dua Pitue	12	Laporan	59.232.000	DAU		12	Laporan	52.539.230

X	XX	.1	.208	.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kec. Dua Pitue	12	Laporan	206.116.000	DAU		12	Laporan	107.110.500
X	XX	.1	.209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan	Kec. Dua Pitue		100%	42.158.000	DAU			100%	57.273.514
X	XX	.1	.209	.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kec. Dua Pitue	10	Unit	34.492.000	DAU		10	Unit	24.579.309
X	XX	.1	.209	.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kec. Dua Pitue	11	unit	4.054.000	DAU		11	unit	5.151.505
X	XX	.1	.209	.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kec. Dua Pitue	4	unit	3.612.000	DAU		4	unit	27.542.700
J U M L A H										2.843.920.130					3.010.389.243

Selanjutnya pengukuran Indikator Sasaran/ Kinerja Program (Outcome) Kantor Kecamatan Dua Pitue disajikan pada table berikut ini:

Tabel . Formulasi pengukuran Indikator Kinerja Program (Outcome) Kantor Kecamatan Dua Pitue

No.	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2024
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%
5.	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan Kantor Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2023, dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Dua Pitue Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Dua Pitue dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Dua Pitue sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dua Pitue merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Dua Pitue;
3. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dua Pitue merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan Dua Pitue;
4. Kecamatan Dua Pitue berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Rencana Strategis Kecamatan Dua Pitue Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Semoga dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kantor Dua Pitue ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang.